



LKjIP

**(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2023**

**Jl. HM Sarbini No. 93, Prumpung, Bumirejo
Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54316**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen sesuai dengan tata nilai yang dianut yaitu "Dinkes PRIMA", Profesional, Responsif, Inovatif, Maju dan Akuntabel .

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Secara teknis tujuan disusunnya LKjIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen adalah sebagai wujud pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), RPJMD maupun Penetapan kinerja tahunan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi serta perwujudan *Good Governance and Clean Government*.

Terima kasih yang dapat kami sampaikan kepada seluruh pihak terkait atas partisipasi, dukungan dan bantuannya dalam penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Semoga bermanfaat.

Kebumen, Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen



dr. Iwan Danardono, Sp.Rad.M.M.R
NIP. 19680321 199903 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2. Fungsi Strategis	6
1.3. Permasalahan Utama Yang Dihadapi	6
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Perencanaan Strategis	8
2.2. Perjanjian Kinerja	12
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2. Realisasi Anggaran	31
Bab IV PENUTUP	36
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	36
4.2. Permasalahan / Kendala.....	36
4.3. Strategi Peningkatan	36
<u>LAMPIRAN</u>	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Ketersediaa SDM Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5
Tabel 2.1	Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU Daerah)Kabupaten Kebumen	11
Tabel 2.2	Tabel Target Indikator Kinerja Tahun 2023	12
Tabel 2.3	Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13
Tabel 2.4	Tabel Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Anggaran 2023	14
Tabel 3.1	Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel 3.2	Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	19
Tabel 3.2	Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya	20
Tabel 3.4	Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir Jangka Menengah	21
Tabel 3.5	Tabel Perbandingan Capaian dengan Provinsi / Kabupaten Lain	22
Tabel 3.6	Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	23
Tabel 3.7	Tabel Realisasi Angka Kematian Ibu Tahun 2023 Kabupaten Kebumen	25
Tabel 3.8	Tabel Angka Kematian Bayi dan Perbandingan Angka Kematian Bayi	27
Tabel 3.9	Tabel Realisasi Capaian Jenis Layanan Dasar Tahun 2023	27
Tabel 3.10	Tabel Permasalahan dan Solusi Dalam Penerapan SPM Kesehatan Tahun 2023	29
Tabel 3.11	Tabel Capaian Peserta KB Aktif Tahun 2023	31
Tabel 3.12	Tabel Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023	31
Tabel 3.13	Tabel Range Capaian Kegiatan Tahun 2023	34
Tabel 3.14	Tabel Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2023	35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Grafik Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Kebumen	24
Grafik 3.2	Grafik Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2023.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama setiap warga negara baik individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh kontribusi dari semua sektor, berdasarkan fungsi dan peranannya masing-masing. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Setiap individu berkewajiban ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Peningkatan derajat kesehatan yang terus diupayakan oleh Pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain lingkungan, perilaku, dan pelayan kesehatan. Perwujudan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan melalui pendekatan antara lain peningkatan upaya kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pembangunan kesehatan di kabupaten Kebumen mengacu pada Renstra Strategis Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen yang telah disusun menggunakan pendekatan; (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, (4) pendekatan atas bawah (top-down), dan (5) pendekatan bawah atas (bottom-up). Selain itu, Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kebumen didasarkan pada pencapaian sasaran prioritas tingkat kabupaten, Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kebumen, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategik (Renstra) maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023. Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja kegiatan

pembangunan kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023 maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dasar hukum berdirinya organisasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati
- d. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 111).

Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten yang tidak lepas dari pembagian urusan konkuren bidang kesehatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Bidang Kesehatan merupakan urusan pemerintah konkuren yaitu urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota. Bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bahwa Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi

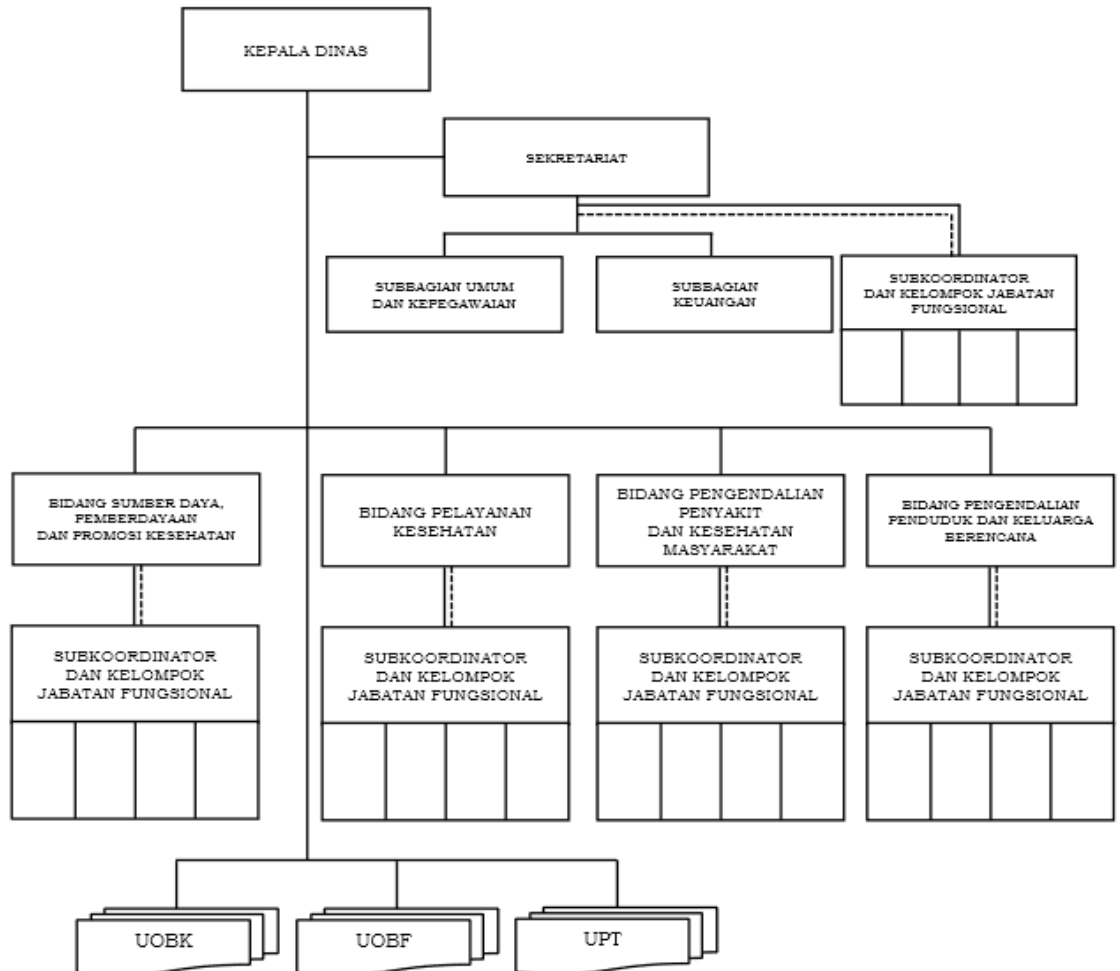
kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari atas (1) Kepala Dinas, (2) Sekretariat, (3) Bidang Sumber Daya, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan, (4) Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Masyarakat (5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (6) Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), (7) Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) (8) Unit Pelaksana Teknis (UPT), (9) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT, UOBK dan UOBF pada Dinas;
dan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
KABUPATEN KEBUMEN**



Adapun komposisi dukungan SDM Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Ketersediaan SDM Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Jenis Tenaga	Jumlah
	Struktural	
1	Struktural Eselon II	1
2	Struktural Eselon III	5
3	Struktural Eselon IV	2
	Jumlah	8
	Fungsional	
1	Epidemiolog Kesehatan	5
2	Administrator Kesehatan	8
3	Apoteker	3
4	Asisten Apoteker	2
5	Nutrisionis	2
6	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	5
7	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	5
8	Sanitarian	4
9	Pembimbing Kesehatan Kerja	1
10	Ahli Pertama - Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1
	Jumlah	36
	JFU	
1	Analisis Kesehatan	2
2	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
3	Analisis Tata Laksana	1
4	Pembimbing Kesehatan Kerja	1
5	Pengadministrasi Alat dan Obat Kontrasepsi	1
6	Pengadministrasi Keuangan	2
7	Pengadministrasi Umum	10
8	Pengelola Akuntansi	2
9	Pengelola Keuangan	4
10	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1
11	Pengelola Program Imunisasi	1
12	Bendahara	1
13	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	1
14	Pengemudi	1
	Jumlah	65
	TOTAL	109

1.2. Fungsi Strategis

Kebijakan desentralisasi di tingkat Kabupaten mengakibatkan dampak pada pemberian kewenangan yang lebih luas bagi daerah kabupaten untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan sesuai kemampuan dan kondisi daerah. Peran dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dalam pembangunan daerah di antaranya adalah:

1. Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan kesehatan nasional bidang kesehatan
2. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar berkualitas melalui pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan sarana prasarana kesehatan
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan yang berkompeten serta pendistribusian SDM Kesehatan yang merata di fasilitas pelayanan dasar
4. Peningkatan pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas
5. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit melalui community base surveillance berbasis masyarakat
6. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
7. Mempercepat perbaikan Gizi masyarakat
8. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan
9. Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi risiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan serta pemberian pelayanan KB lanjutan
10. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan intensitas layanan KB

1.3. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Pembangunan kesehatan menitikberatkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Hal ini menjadi dasar dalam pemberian pelayanan kesehatan masyarakat secara komprehensif.

Permasalahan kesehatan di setiap wilayah berbeda – beda sesuai dengan karakteristik permasalahan kesehatan yang dihadapi. Indikator untuk menilai tingkat derajat kesehatan menjadi fungsi utama dalam pencapaian target pelayanan kesehatan.

Indikator derajat kesehatan masyarakat, tercermin dalam kondisi angka kematian, angka kesakitan dan status gizi. Semakin rendahnya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) dan status gizi buruk masyarakat maka semakin tinggi derajat kesehatan masyarakat. Permasalahan – permasalahan tersebut di atas yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

1. Renca Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana stratejik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kebumen dengan melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah periode 2021 – 2026.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada perencanaan strategis yang akan dicapai maka perlu didukung oleh program kegiatan. Sesuai ketentuan, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah turunan dari RPJM Daerah. Dengan demikian visi, misi Renstra Perangkat Daerah sama dengan Visi, Misi Daerah.

a. Visi

Visi Daerah tahun 2021-2026 adalah: “MEWUJUDKAN KABUPATEN KEBUMEN SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT“. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan

hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- 2) **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan
- 3) **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam

setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Dengan visi tersebut, dibuatlah slogan: “**KEBUMEN SEMARAK**” yang merupakan akronim dari “**Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat**”

b) Misi

Untuk mencapai visi daerah “MEWUJUDKAN KABUPATEN KEBUMEN SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT”

maka dilaksanakan lima misi yaitu.

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
- 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
- 3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 5) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

Berdasarkan visi-misi di atas, maka yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen menitikberatkan pada pelaksanaan misi bupati yang ke-2 Bupati yaitu : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan".

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen berikut ini.

Tabel 2.1
Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU Daerah) Kabupaten Kebumen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan		Angka Harapan Hidup	Tahun	73,60	73,70	73,80	73,90	74,00
2		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100	100	100	100	100
3		Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana	%	63,5	63,5	64,5	65	65

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan dan sasaran sebagaimana tabel di atas, maka target kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tabel Target Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan		Angka Harapan Hidup	Tahun	73,70
2		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100
3		Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana	%	63,5

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya. Tujuan perjanjian kinerja tersebut meliputi :

- a. Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 yang berisi 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan pada tahun 2023. Indikator kinerja tersebut telah mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. Rincian indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kebumen pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 2.3
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Meningkat-nya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,60				
	Sasaran :							
2	Meningkat-nya mutu pelayanan kesehatan	Prosentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	100				
3	Meningkat-nya pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	%	63,5				

Pelaksanaan perjanjian kinerja pada tahun 2023, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kebumen didukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kinerjanya dengan rincian sebagaimana tabel 2.4

Tabel 2.4
Tabel Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Anggaran 2023

No	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	209.754.054.272
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	11 Dokumen	75.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	131.389.973.272
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	130 orang	45.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	286.100.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11 Unit	290.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	621.360.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55 Unit	490.000.000
8	-Peningkatan Pelayanan BLUD - BLUD RS	Jumlah Kegiatan pelayanan BLUD	4 Kegiatan	76.556.621.000 222.051.469.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Kesehatan	100%	127.028.059.000
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara	34 paket	45.249.848.000
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase capaian layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kab/kota	100%	81.567.411.000
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	100%	30.000.000
12	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prosentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Memiliki Izin	100%	180.800.000

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	100%	3.402.385.000
13	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	2 Dokumen	40.000.000
14	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM Tingkat Daerah Kab / kota	200 orang	3.362.385.000
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	100%	548.172.000
15	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pemberian Ijin dan pengawasan apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal (UMOT)	100%	83.730.000
16	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah penerbitan sertifikat PIRT sbagai izin Produksi untuk makanan minuman tertentu yg dapat diproduksi oleh RT dan pengawasan produk PIRT	315 izin	464.442.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	95%	3.171.781.000
17	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	65.000.000
18	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	70.000.000
19	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.036.781.000

	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	33,30%	715.390.000
20	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah lembaga pendidikan formal dan nonformal yang mengimplementasikan pendidikan kependudukan	5 lembaga	60.000.000
21	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten	2 Dokumen	655.390.000
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	63,5	10.907.193.000
22	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	4	1.494.300.000
23	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan Kader IMP yang diberdayakan	2647	2.688.637.000
24	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	5.464.648.000
25	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Kegiatan	1.259.608.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	70,4	7.066.108.000
26	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	3	7.036.108.000

27	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah mitra kerja yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	4	30.000.000
----	--	--	---	------------

Pada tahun anggaran 2023, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen melaksanakan 8 program dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja operasi sebesar Rp. 528.912.765.272,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 55.731.846.000,-

Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan pengadaan sarana prasarana kesehatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yaitu:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

1. Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kebumen dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkat-nya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	73,60	73,83	100,31	Sangat Baik	BPS Kabupaten
2	Meningkat-nya mutu pelayanan kesehatan	Prosentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	100%	100%	Baik	Bidang P2Kesmas / Dinkes PPKB
3	Meningkat-nya pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	63,50 %	69,96%	110,17	Sangat Baik	Bidang PPKB / Dinkes PPKB

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 73,83 dari target 73,60 sehingga capaian kinerja 100,31 %. Pada indikator Prosentase Capaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2023 telah mencapai realisasi 100% dari target 100% sehingga capaian kinerja 100%. Indikator ketiga Cakupan Peserta KB Aktif pada tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 69,96% dari target 63,50% sehingga capaian kinerja 110,17%.

2. Perbandingan Kinerja

Berikut adalah tabel perbandingan kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Tabel 3.3

Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	73,01	73,35	100,46%	73,60	73,70	100,14%	73,60	73,83	100,31%
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Prosentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100	88	88%	100	97,54	97,54%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	65	69,05	106,23%	63,5	68,84	108,409%	63,50	69,96	110,17%

Bila dilihat dari tabel 3.3, Angka harapan hidup , prosentasi SPM dan Cakupan Peserta KB Aktif, mengalami kenaikan. Tahun 2021 Angka Harapan Hidup mencapai 73,35 tahun, pada Tahun 2022 mencapai 73,70 tahun dan Tahun 2023 mencapai 73,83 tahun. Prosentase capain SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 adalah 88%, Tahun 2022 adalah 97,54% dan Tahun 2023 adalah

100%. Cakupan Peserta KB Aktif pada tahun 2021 adalah 69,05, Tahun 2022 adalah 68,84 dan Tahun 2023 adalah 69,96

3. Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dengan
Target Akhir Jangka Menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6(4/5*100)$
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	73,83	74	99,77%
	Meningkat-nya mutu pelayanan kesehatan	Prosentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	100%	100%
	Meningkat-nya pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	69,96	65	107,63%

4. Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional / Provinsi/ Kabupaten / Kota Lain

Tabel 3.5

Tabel Perbandingan Capaian dengan Provinsi / Kabupaten Lain

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Provinsi* / Kabupaten Lain (Klaten) Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6(4/5*100)
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	73,83	74,69*	98,84%
	Meningkat-nya mutu pelayanan kesehatan	Prosentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	100%	100%
	Meningkat-nya pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	69,96	-	-

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan harapan hidup saat lahir. Harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu negara. Angka Harapan Hidup merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam perhitungan IPM. AHH Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 adalah 73,83 Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah AHH Kabupaten Kebumen masih lebih rendah dari Jawa Tengah (74,69) tahun. Pada Indikator capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen capaian 100% adalah sama dengan capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Klaten adalah mencapai 100% untuk tahun 2023.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan **Solusi**

Tabel 3.6

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Meningkat-nya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	73,60	73,83	100,31	Upaya kesehatan perseorangan dan upayan kesehatan masyarakat dengan integrasi paket pelayanan kesehatan primer menurut kebutuhan siklus hidup	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sebagai tolak ukur indikator derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan pelayanan rujukan secara terintegrasi
2	Meningkat-nya mutu pelayanan kesehatan	Prosentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	100%	100%	Masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal kesehatan Masyarakat terpenuhi standar mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan dan peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan sumber daya kesehatan
3	Meningkat-nya pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	63,50%	69,96%	110,17	Masyarakat mendapatkan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan standar pelayanan KB	Pemerataan dan peningkatan jangkauan pelayanan kontrasepsi dan peningkatan sumber daya

6. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan **Solusi** Program dan Kegiatan

1) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Grafik 3.1

Grafik Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Kebumen



Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa angka harapan hidup penduduk Kebumen dari tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Tahun 2021 Angka Harapan Hidup adalah 73,35 tahun, pada Tahun 2022 adalah 73,70 tahun dan Tahun 2023 mencapai 73,83 tahun. Angka harapan hidup yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Penentuan usia harapan hidup dapat didasarkan dari beberapa indikator kesehatan antara lain angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

a) Angka kematian ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai

derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Tabel 3.7

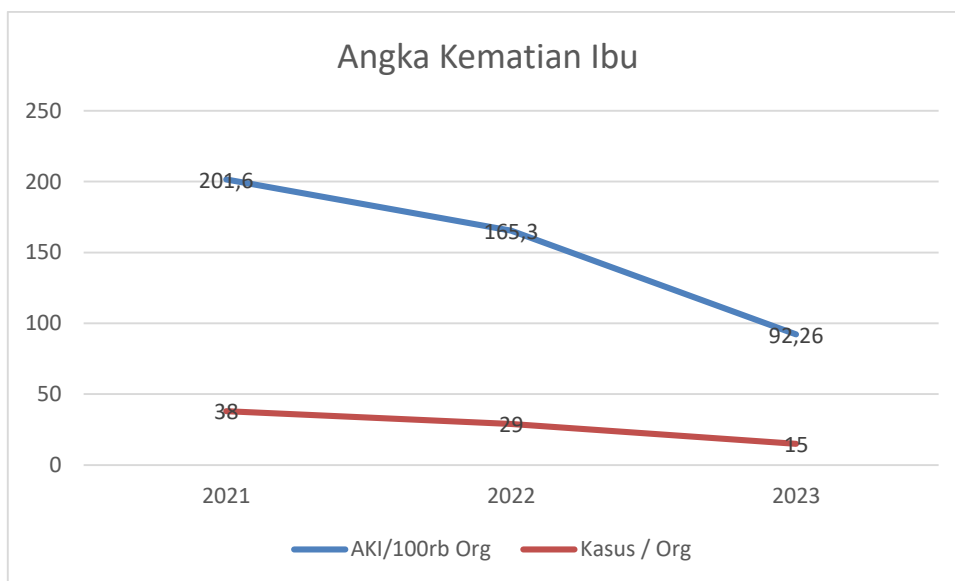
Tabel Realisasi Angka Kematian Ibu Tahun 2023
Kabupaten Kebumen

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			T.Akhir RPJMD 2024	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Kematian Ibu	165,2/100.000K H	107,42/100.000 KH	92,26 / 100.000 KH	116,43%	97,20/100.000 KH	110,51%

Pada tahun 2023 Kabupaten Kebumen Angka Kematian Ibu mencapai 92,26/100.000 Kelahiran Hidup dimana lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 165,2/100.000 Kelahiran Hidup. Perbandingan AKI tahun 2021 hingga 2023 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ;

Grafik 3.2

Grafik Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2023



Pada grafik 3.2 dapat dilihat bahwa Angka Kematian Ibu Tahun 2021 adalah 201,6/100.000KH atau mencapai 38 kasus, pada Tahun 2022 adalah adalah 165,3/100.000KH atau mencapai 29 kasus dan

Tahun 2023 adalah 92,26/100.000KH atau mencapai 15 kasus. Capaian ini menggambarkan Angka Kematian Ibu yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2021.

Pada Tahun 2023 Jumlah kasus kematian ibu 15 kasus dengan berbagai penyebab kematian ibu antara lain perdarahan sebanyak 5 kasus, hipertensi pada kehamilan sebanyak 1 kasus, kelainan jantung dan pembuluh darah 2 kasus, gangguan autoimun 1 kasus, lain –lain 6 kasus.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu yang disajikan terdiri dari: (1) pelayanan kesehatan ibu hamil, (2) pelayanan kesehatan ibu bersalin, (3) pelayanan kesehatan ibu nifas, (4) pelayanan komplikasi kebidanan dan (5) pelayanan kontrasepsi. Namun demikian masih terdapat kendala/hambatan antara lain masih kurangnya catatan yang baik dari data ibu hamil kehamilan resti ataupun faktor resiko, belum diadakannya evaluasi secara mendalam mengenai angka kemataian ibu dan komplikasi dalam kehamilan, pelaksanaan jejaring rujukan kurang optimal.

Solusi / upaya mempertahankan realisasi indikator kinerja angka kematian ibu antara lain terus meningkatkan Upaya program kerja tentang kesehatan ibu (upaya promotif, upaya perbaikan gizi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, Pemberdayaan Keluarga Berencana), Peningkatan antenatal yang berkualitas (mampu mendeteksi dan menangani kasus resiko tinggi secara memadai), pelayanan pasca persalinan/kelahiran yang aman, meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan obstetri yang komprehensif mudah dijangkau serta meningkatkan jejaring rujukan Puskesmas PONED ke RS PONEK.

b) Angka kematian bayi

Angka kematian bayi tahun 2023 adalah 10,82 KH dari target 7,47/1000 KH, dan lebih tinggi dari angka kematian bayi pada tahun 2022 adalah 10,26/1000 KH dari target 7,57/1000 KH.

Tabel 3.8

Tabel Angka Kematian Bayi dan Perbandingan Angka Kematian Bayi

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			T.Akhir RPJM D 2024	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Kematian Bayi	10,26/ 1000 KH	7,47/ 1000 KH	10,82 / 1000 KH	%	7,37/ 1000 KH	71,83%

Pada tahun 2023 angka kematian bayi sebanyak 203 kasus. Sebagian besar penyebab kematian bayi adalah berat badan lahir rendah 27,59%, kelainan kongenital 25,62%, karena asfiksia, 16,75% dan karena penyebab lainnya di bawah 5%.

2) Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan

Pada sasaran kedua meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang dijabarkan dalam 12 indikator Sasaran Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar kesehatan secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Berikut adalah target dan capaian SPM Kesehatan pada tahun 2023.

Tabel 3.9

Tabel Realisasi Capaian Jenis Layanan Dasar Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	16.289	16.289	100	3.368.541.000	3.268.202.803	97,02
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	16.289	16.289	100	88.000.000	87.894.200	99,88
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	16.259	16.259	100	35.000.000	34.692.900	99,12
4	Pelayanan kesehatan balita	74028	74028	100	1.819.869.000	1.761.339.800	96,78

5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	18.6457	18.6457	100	531.560.000	423.693.600	79,71
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	533.922	533.922	100	1.635.481.000	1.624.080.700	99,30
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	167.524	167.524	100	778.940.000	747.422.864	95,95
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	58.291	58.291	100	40.000.000	39.972.300	99,93
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	10.339	10.339	100	45.000.000	44.974.000	99,94
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	4.426	4.426	100	279.480.000	264.518.223	94,65
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	16.568	16.568	100	448.279.000	420.684.300	93,84
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	23.273	23.273	100	513.390.000	501.810.508	97,74

SPM bidang Kesehatan terdiri dari 12 indikator dengan target masing-masing indikator adalah 100%. Capaian penerima layanan pelaksanaan untuk pelayanan dasar kesehatan daerah Kabupaten Kebumen pada 12 indikator pelayanan kesehatan dasar telah tercapai 100%. Demikian halnya penyediaan mutu layanan dasar juga telah tercapai 100%. Pada capaian realisasi keuangan tertinggi pada Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar 99,94% sedangkan realisasi keuangan terendah terdapat pada Pelayanan Kesehatan Pada Usia Dasar 79,71% dikarenakan kebijakan Juknis yang tidak bisa dilaksanakan yaitu berupa transport lokal ASN yang tidak bisa direalisasikan sesuai regulasi yang berlaku di Daerah Kabupaten Kebumen.

Tabel 3.10
Tabel Permasalahan dan Solusi Dalam Penerapan SPM Kesehatan
Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	SDM	Beban Petugas yang tinggi	Menambah SDM, Peningkatan kompetensi
2	Anggaran	Kebijakan juknis penggunaan anggaran DAK yang belum bisa sinkron dengan aturan di Daerah	Koordinasi kebijakan penggunaan anggaran dengan Instansi Induk
II	EKSTERNAL		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
4	Pelayanan kesehatan balita	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran

3) Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana

Indikator sasaran ke 3 meningkatnya pelayanan keluarga berencana dengan indikator Cakupan Peserta Keluarga Berencana Aktif. Berikut permasalahan dan kesesuaian terhadap target kinerja.

Capaian peserta KB aktif pada tahun 2023 sebesar 69,96% dari target 63,5%. Capaian merupakan hasil yang sudah sesuai dengan target program. Adapaun realisasi sudah memenuhi dari target. adapun permasalahan dan kesesuaian terhadap target kinerja sebagai berikut:

a) Permasalahan dan **solusi**

- 1) Pelayanan KB metode MKJP terutama yang MOW belum banyak peminatnya.
- 2) Kepesertaan KB untuk metode kontrasepsi MOW masih rendah.

b) Upaya mengatasi masalah

Adapun upaya yang ditempuh di tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) KB pasca salin dan pasca keguguran untuk bisa dimaksimalkan;
- 2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dipertajam melalui berbagai media baik elektronik, cetak dan media luar ruang, KIE perorangan dan kelompok serta media sosial lainnya

Tabel 3.11

Tabel Capaian Peserta KB Aktif Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Cakupan peserta KB aktif	%	63,50	69,96	110,17	65,00

Berdasarkan tabel capaian indikator program cakupan peserta KB aktif pada tahun 2023 adalah 69,96 dengan capaian kinerja 110,17% atau kategori sangat tinggi dimana hasil ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan memiliki nilai sangat baik.

3.2. Realisasi Anggaran

Total belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar Rp 584.644.611.272,- dengan realisasi keuangan Rp. 560.651.430.901,- atau 95,90%. Dengan demikian dapat diartikan semua rencana program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Data ini dapat lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.12

Tabel Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	TOTAL REALISASI (Rp)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	431.805.523.272	413.804.716.741	95,83
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	74.743.500	99,66
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	131.389.973.272	129.432.176.590	98,51
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000	44.975.000	99,94
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.100.000	285.967.279	99,95
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	290.000.000	285.783.000	98,55
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.360.000	518.023.708	83,37

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.000.000	487.472.495	99,48
8	-Peningkatan Pelayanan BLUD	76.556.621.000	71.339.102.603	93,18
	-BLUD RS	222.051.469.000	211.336.472.566	95,17
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	127.028.059.000	122.093.093.088	96,12
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.249.848.000	43.514.118.576	96,16
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.567.411.000	78.371.100.699	96,08
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	30.000.000	29.369.202	97,90
12	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180.800.000	178.504.611	98,73
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.402.385.000	3.313.798.383	97,40
13	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	40.000.000	39.829.366	99,57
14	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.362.385.000	3.273.969.017	97,37
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	548.172.000	547.419.504	99,86
15	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.730.000	83.611.677	99,86
16	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	464.442.000	463.807.827	99,86
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.171.781.000	3.064.315.298	96,61
17	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	65.000.000	100,00
18	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	69.870.000	99,81
19	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.036.781.000	2.929.445.298	96,47

	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	715.390.000	660.651.702	92,35
20	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	60.000.000	59.941.559	99,90
21	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	655.390.000	600.710.143	91,66
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.907.193.000	10.264.431.187	94,11
22	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.494.300.000	1.346.952.472	90,14
23	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pengendalian dan Pendistribusian	2.688.637.000	2.681.643.358	99,74
24	Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	5.464.648.000	4.976.639.807	91,07
25	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.259.608.000	1.259.195.550	99,97
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.066.108.000	6.903.004.998	97,69
26	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.036.108.000	6.873.267.198	97,69
27	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	30.000.000	29.737.800	99,13
	JUMLAH	584.644.611.272	560.651.430.901	95,90

Dari 27 kegiatan yang ada, ada 1 kegiatan yang kinerja keuangan di bawah 90% yaitu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 83,37%, dan yang tertinggi adalah kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mencapai 100%. Sedangkan secara umum kinerja keuangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 mencapai 95,90%. Evaluasi kinerja keuangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.13

Tabel Range Capaian Kegiatan Tahun 2023

No	Program	Jumlah Kegiatan	Range capaian 90-100 %	Range capaian < 90 %
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8 keg	7 keg	1 keg
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4 Keg	4 keg	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 keg	2 keg	
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	2 keg	2 keg	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3 keg	3 keg	
6	Program Pengendalian Penduduk	2 Keg	2 keg	
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4 keg	4 keg	
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2 keg	2 keg	

Berdasarkan tabel diatas, dari 8 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023, capaian keuangannya adalah 95,90%. Adapun untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi=

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Tabel 3.14

Tabel Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	73,6	73,83	100,31%	584.644.611.272	560.651.430.901	95,90%	25.820.194.781	586.471.625.682
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase Capaian SPM Kesehatan	100	100	100%			#DIV/0!	-	-
Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana	63,5	69,96	110%			#DIV/0!	-	-
							#DIV/0!	-	-
							#DIV/0!	-	-
					584.644.611.272	560.651.430.901	Jumlah	25.820.194.781	586.471.625.682
								Efisiensi= (sum 9 / sum 10)	4,40%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen berada pada angka 4,40%, dari pagu anggaran neto rentang nilai antara (-20% sampai dengan 20%). Ditinjau dari aspek efisiensi, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dari hasil analisa data pada bab III, secara keseluruhan kinerja Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan yang dapat diartikan bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten Kebumen terus mengalami perbaikan dan derajat kesehatan masyarakat meningkat dimana dapat diketahui dari capaian pada tahun 2022 adalah 73,70 tahun menjadi 73,83 tahun.
- 2) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang terdiri dari 12 indikator pelayanan telah mencapai target yaitu 100%, sehingga bahwa secara umum hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara minimal telah terpenuhi.
- 3) Cakupan Peserta KB Aktif pada tahun 2023 memenuhi target yaitu 69,96% dari target yang ditetapkan adalah 63,50%, sehingga peningkatan cakupan peserta KB aktif dapat meningkatkan status kesehatan Pasangan Usia Subur di Kabupaten Kebumen dan diharapkan dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kualitas SDM dapat meningkat dan dapat mengentaskan kemiskinan.
- 4) Evaluasi Kinerja Keuangan dari 8 Program dan 27 kegiatan sebesar 26 kegiatan (96,29%) masuk dalam kategori pencapaian 90-100%, sedangkan 1 kegiatan (3,7 %) masuk dalam kategori pencapaian < 90%. Secara umum kinerja keuangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 mencapai 95,90%.

4.2. Permasalahan / Kendala

Permasalahan secara umum yang masih dihadapi adalah masih tingginya angka kematian bayi. hal ini masih menjadi pekerjaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk lebih meningkatkan pelayanan pada bayi baru lahir termasuk pelayanan gizi dan penanganan bayi pada masa neonatal. Umur harapan hidup mempunyai korelasi penting dari dari

angka kematian bayi, sehingga hal ini menjadi kendala dimasa mendatang untuk mempertahankan atau meningkatkan usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Kebumen, jika angka kematian bayi masih tinggi.

Kendala umum kinerja keuangan adalah masih adanya ketentuan juknis yang belum bisa dilakukan pembelanjaan dikarenakan peraturan yang melekat pada pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan adanya kegiatan tidak dapat menyerap belanja secara maksimal.

4.3. Strategi peningkatan

Dengan melihat kinerja Dinas Kesehatan khususnya yang terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemui serta agar lebih meningkat kinerjanya tahun yang akan datang perlu ditempuh beberapa hal berikut ini:

1. Optimalisasi pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai target kegiatan lebih optimal
2. Mengembangkan dan peningkatan kerjasama lintas sektor dan swasta terutama dalam hal kemitraan guna mendorong pembangunan yang berwawasan kesehatan yang sinergis.
3. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan melalui peningkatan akses dan jangkauan pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan peningkatan kualitas SDM yang profesional melalui pelatihan teknis dan pemenuhan sarana prasarana kesehatan.
5. Pemenuhan upaya kesehatan perseorangan dan upayan kesehatan masyarakat dengan integrasi paket pelayanan kesehatan primer menurut kebutuhan siklus hidup
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan standarisasi dan peningkatan pelayanan dasar untuk memperkuat layanan primer
7. Penguatan kampanye dan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat menggunakan platform digital dan tokoh masyarakat
8. Peningkatan akses dan mutu layanan sekunder dengan peningkatan pelayanan rujukan terintegrasi dan pengembangan Rekam Medis Elektronik menuju digitalisasi sektor kesehatan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. H.M Sarbini No. 93 Telp.(0287) 381572 Fax.(0287) 384873

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : dr. IWAN DANARDONO, Sp.Rad,M.M.R
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH
Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 20 Januari 2023
KEPALA DINKES PPKB

dr. IWAN DANARDONO, Sp.Rad,M.M.R
NIP. 19680321 199903 1 006

BUPATI KEBUMEN



H. ARIF SUGIYANTO, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA


No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Meningkat-nya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,60				73,60
	Sasaran :							
2	Meningkat-nya mutu pelayanan kesehatan	Prosentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	100				
3	Meningkat-nya pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	%	63,5				63,5

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 208.166.517.000,-	
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 118.813.666.000,-	JKN perangkat Desa 5.213.000,-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 2.151.350.000,-	Pemenuhan target
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 548.172.000,-	Indikator Kinerja Urusan Kesehatan
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 559.000.000,-	juga didukung anggaran DAU
6.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 341.976.000,-	Earmarked pada
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 11.178.022.000,-	Urusan Pemerintah
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 6.817.000.000,-	yang diampu Sekretariat Daerah

Kebumen, 20 Januari 2023
KEPALA DINKES PPKB

BUPATI KEBUMEN

H. ARIF SUGIYANTO, SH


dr. IWAN DANARDONO, Sp.Rad,M.M.R
NIP. 19680321 199903 1 006